

**PENGARUH PANGLIMA SAGOE TERHADAP POLA PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA PILKADA ACEH SELATAN 2018**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKI AMANDA
NIM. 170801123

Jurusan Ilmu Politik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Amanda
NIM : 170801123
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pengaruh Panglima Sagoe Terhadap Pola Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Aceh Selatan 2018

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2022
Yang Menyatakan,



Rizki Amanda

**“PENGARUH PANGLIMA SAGOE TERHADAP POLA PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA PILKADA ACEH SELATAN 2018 “**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

RIZKI AMANDA

NIM. 170801123


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Eka Januar, S.I.P., M.Soc., SC.
NIP. 198401012015031003


Ramzi Murziqin, M.A.
NIP. 198605132019031006

**“PENGARUH PANGLIMA SAGOE TERHADAP POLA PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA PILKADA ACEH SELATAN 2018 “**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal


: Selasa, 26 Juli 2022 M

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris



Eka Januar, S.I.P., M.Soc., SC.
NIP. 198401012015031003

Ramzi Murziqin, M.A.
NIP. 198605132019031006

Penguji I

Penguji II

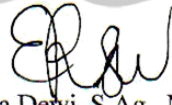


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197801162008011011

Arif Akbar, M.A
NIP. 199110242022031001

A R R A N I R Y
Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Ermita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 19730723200003200

ABSTRAK

Nama : Rizki Amanda
NIM : 170801
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
Judul : Pengaruh Panglima Sagoe Terhadap Pola Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Aceh Selatan 2018
Pembimbing I : Eka Januar, S.I.P., M.Soc., SC.
Pembimbing II : Ramzi Murziqin, M.A.
Kata Kunci : *Panglima Sagoe, partisipasi masyarakat dalam pilkada Aceh Selatan 2018*

Penelitian ini berjudul Pengaruh Panglima Sagoe Terhadap Pola Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Aceh Selatan 2018 dilakukan untuk Mengetahui Seberapa besar pengaruh panglima sagoe terhadap pola partisipasi politik masyarakat Aceh Selatan pada pilkada 2018 dan bagaimakah peran panglima sagoe pada pilkada Aceh Selatan di tahun 2018 kemarin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Panglima sagoe sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan calon kandidat oleh masyarakat dalam pilkada tahun 2018 silam. Selain itu panglima sagoe juga berpengaruh terhadap ikut serta masyarakat dalam dunia politik seperti maju dalam pilkada. Dukungan yang diberikan oleh panglima sagoe mampu memberi dampak langsung terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap kontestasi politik yang diadakan di Aceh Selatan, seperti pada kegiatan pilkada Aceh Selatan tahun 2018 silam. Sedangkan untuk peran panglima sagoe dalam pilkada Aceh selatan tahun 2018 sangat besar, dimana masyarakat akan ikut terlibat dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun mencalonkan diri semua tergantung arahan dan usulan dari pihak panglima sgoe. Ini menandakan panglima sagoe mampu memainkan peran penting di Aceh Selatan. Panglima sagoe memainkan perannya dengan cara mengajak, mengkampanyekan dan mengedukasi ke masyarakat pentingnya berpartisipasi dalam pilkada.

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Panglima Sagoe Terhadap Pola Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Aceh Selatan 2018” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
3. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
4. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
5. Muslim Zainuddin. M.A Selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Eka Januar, S.I.P., M.Soc., SC. selaku pembimbing I dan Ramzi Murziqin, M.A. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Seluruh Dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberi ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan
8. Kepada orang terdekat....., Yulis Saputra S.I.P, teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2017 dan family S.I.P dan sahabat-sahabat penulis. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.



Penyusun

Rizki Amanda

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
ABTRAKS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang Masalah	1
1.2. Rumusan masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pembahasan yang relevan.....	9
2.2. Landasan Teori	13
2.2.1. Partisipasi Politik.....	13
2.2.2. Defenisi Partisipasi Politik	13
2.2.3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	13
2.2.4. Kelompok-Kelompok Dalam Partisipasi Politik	15
2.3. Konsep Elektabilitas	17
2.4. Modal Sosial	20
2.4.1. Modal Ekonomi.....	20
2.4.2. Modal Kultural	21
2.4.3. Modal Sosial	22
2.4.4. Modal Simbolik.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1. Pendekatan Penelitian.....	25
3.2. Fokus Penelittian	25
3.3. Lokasi Penelitian	25
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	26
3.5. Informan Penelitian	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	28
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	29
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.1.1 Sejarah dan Letak Geografis Kabupaten Aceh Selatan	29
4.1.2 Batas Wilayah.....	31
4.1.3 Etnik	31
4.1.4. Sosial Keagamaan	32
4.1.5. Kecamatan	32

4.1.6 Kondisi Ekonomi.....	33
4.1.7. Pendidikan dan Kesehatan.....	34
4.2. Pengaruh Panglima Sagoe Terhadap Pola Partisipasi Politik Masyarakat Aceh Selatan Pada Pilkada 2018	35
4.3. Peran Panglima Sagoe Pada Pilkada Aceh Selatan Di Tahun 2018	46
V. PENUTUP	52
5.1. Kesimpulan.....	52
5.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 disambut oleh rakyat Aceh dengan semangat jihad. Rakyat Aceh turut aktif mempertahankan kemerdekaan dengan semboyan “Merdeka atau Mati Syahid”. Namun hal tersebut, mengalami kekecewaan rakyat Aceh kepada kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Adapun kebijaksanaan Pemerintah Pusat kepada rakyat Aceh, yakni; pemerintah kurang memperhatikan kepentingan rakyat Aceh, pemerintah menghalangi pelaksanaan ajaran Islam, tidak menghendaki pelaksanaan piagam Jakarta, status Aceh sebagai provinsi dengan otonomi luas, mengenai pembubaran provinsi Aceh, pemerintah dinilai kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemberhentian Daud Beureuh sebagai Gubernur.¹

Akibat kekecewaan rakyat Aceh kepada kebijaksanaan Pemerintah Pusat, pada tanggal 21 September 1953 terjadi berbagai sebutan atau nama antara lain, “Peristiwa Daud Beureuh”, “Pemberontakan Daud Beureuh” atau “Peristiwa Berdarah”. Dimana pada tanggal tersebut Tengku Muhammad Daud Beureuh, selaku mantan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo dan juga seorang ulama yang sangat berpengaruh, melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Pusat dengan memproklamasikan sebagai bagian dari

¹ Hardi, Daerah Istimewa Aceh; *Latar Belakang Politik dan Masa depannya* (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), cet ke-1, hlm 111-121

Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949.²

Setelah terjadinya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, kabinet-kabinet yang berkuasa sejak tahun 1953 dengan sendirinya berkewajiban untuk menyelesaikan pergolakan tersebut. Disamping kebijaksanaan Pemerintah pusat untuk mengatasi peristiwa berdarah dengan konsepsi prinsipil bijaksana. Lewat gagasan ini pimpinan penguasa perang daerah Aceh hendak mengajak para pemimpin DI/TII, agar dapat menyelesaikan masalah Darul Islam Aceh secara damai dengan prasyarat bahwa Aceh harus tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Lewat musyawarah antara Dewan Revolusi Darul Islam dengan misi Pemerintah Pusat, pada tanggal 26 Mei 1959 Dewan Revolusi Darul Islam telah menyetujui secara bulat usul-usul misi Pemerintah Pusat. Untuk menyatakan perjanjian misi Pemerintah Pusat, maka hal tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 26 Agustus 1959, Nomor.1/Misi/1959 dengan pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah didasarkan pada faktor-faktor nyata, sesuai dengan perkembangan daerah Aceh serta kebutuhan dan faktorfaktor nyata dari masyarakat Aceh itu sendiri dengan sebutan sistem otonomi yang luas tapi riil.⁴

² *Ibid*, hlm 131-132

³ *Ibid*, hlm 137.

⁴ *Ibid*, hlm 178-179.

Pada tanggal 4 Desember 1976 muncullah gerakan ideo-nasionalisme Aceh Merdeka, atau Atjeh-Sumatera National Liberation Front (ASNLF), yang menuntut pemisahan diri dari Republik Indonesia, dipimpin oleh Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro. Cita-cita gerakan ini adalah mendirikan Negara/Kerajaan Aceh Sumatera. Arus utama ideologi yang dipakai merujuk pada perspektif historis bahwa Aceh tidak pernah dijajah oleh Belanda atau sultan Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda. Oleh karena itu, penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia, seharusnya tidak termasuk wilayah Aceh. Sejak 1976 itulah Aceh bergolak kembali. Ketika itu Kodam I/Iskandar Muda masih ada, sehingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat dipadamkan dan diredam dalam tempo yang relatif singkat dan Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro serta beberapa pengikutnya memilih berjuang di luar Negeri.⁵

Akan tetapi pada tahun 1989 GAM muncul kembali di Aceh, yang di daerah dipimpin oleh beberapa desertir TNI/Polri dan tokoh-tokoh lokal, sebagai akibat dari sistem represif dan opresif yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk memenangkan Golkar (Partai Golongan Karya) dalam Pemilihan Umum 1987, yang sangat menekan dan menyinggung rasa keadilan rakyat, sehingga rakyat mudah sekali terpicu untuk bangkit kembali dalam gerakan yang sebenarnya sudah hampir-hampir mereka lupakan. Provokasi yang mudah merasuk ke dalam pikiran sebagian rakyat adalah ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan kehidupan, termasuknya didalamnya pengangguran

⁵ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006), hlm 8

dan ditutupnya pelabuhan bebas sabang pada tahun 1984 serta dihapuskannya tunjangan pensiunan berdasarkan surat keterangan berkas tentara (SKBT) kepada mereka yang telah turut berjuang selama revolusi fisik di awal kemerdekaan.⁶

Sebelumnya, pada tahun 1985, Kodam I/Iskandar Muda di likuidasi ke dalam Kodam Bukit Barisan di Medan. Maka untuk menumpas GAM, mulai tahun 1989 itu digelar sebuah operasi yang lebih luas, bernama Operasi Jaring Merah, atau lebih dikenal sebagai pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM). Komando pemulihan keamanan Aceh dipegang oleh Kodam I/Bukit Barisan, dengan dua korem yang berada di Aceh, yakni Korem 011/Liliwangsa di Lhokseumawe dan Korem 012/Teuku Umar di Banda Aceh. Pada Juli 1990, Presiden Soeharto mengerahkan 6.000 pasukan tambahan, termasuk dua batalyon dari Kopassus dan unit-unit tentara lainnya seperti Kujang Siliwangi, Kodam VII/Brawijaya, Arhanud Medan, Linud Medan dan Brimob. Semua kekuatan ini dikerahkan untuk menghadapi sisa-sisa kekuatan GAM atau GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), yang pada tahun 1990 berjumlah 203 orang, yaitu; 60 orang sisa GAM angkatan pertama (24 diantaranya didikan luar negeri), 143 anggota baru didikan luar negeri (30 orang di Pidie, 83 di Aceh Utara, 24 di Aceh Timur dan 6 di Aceh Tengah).⁷

Hingga Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) Jenderal TNI Wiranto pada tanggal 7 Agustus 1998, militer Indonesia tidak berhasil

⁶ *Ibid*, hlm 8.

⁷ *Ibid*, hlm 9.

menumpas gerakan ini, padahal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya mempunyai basis yang kuat di empat kabupaten, yaitu Pidie, Aceh Utara Aceh Timur, dan Aceh Selatan dari 10 kabupaten/kota madya yang ada waktu itu.⁸ Setelah pemilu 7 Juni 1999, kekerasan masih terus terjadi dan tuntutan referendum atau Aceh Merdeka semakin terasa gemanya di masyarakat, di samping tuntutan otonomi luas (khusus). Tuntutan referendum yang sebelum 1999 di suarakan mahasiswa dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), setelah pemilu 1999 tuntutan ini di dukung pula oleh ulama-ulama yang membentuk HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) ini menuntut pemerintah pusat segera melaksanakan referendum atau jajak pendapat di bawah pengawasan masyarakat Internasional. Pada masa ini, GAM pimpinan Teungku Dr. Muhammad Hasan di Tiro pun bergerak lebih agresif. Pada tanggal 29 September komandan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Pasee, Batee Iliiek, dan Pidie mengeluarkan pamflet berisi seruan agar kantor-kantor pemerintah menghentikan kegiatannya terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1999. Sebelumnya, kerap pula terjadi tindak kekerasan dalam rangka menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh aparat keamanan terhadap rakyat sipil, seperti tragedi Alue-Nireh (Peureulak, Aceh Timur) tanggal 12 Juni 1999 yang mengakibatkan 5 warga sipil tewas, dan kasus Beutong Ateuh yang menewaskan 57 warga, yaitu Teungku Bantaqiah dan para santrinya.⁹

Pada 26 Desember 2004 gempa bumi 8.9 skala rechter terjadi di bawah laut Samudera Indonesia, kurang lebih 150 kilometer dari lepas pantai barat

⁸ *Ibid*, hlm 10.

⁹ *Ibid*, hlm 36-38.

Aceh. Hanya dalam 45 menit kemudian, gelombang tsunami melanda Aceh dan dalam waktu beberapa menit saja gelombang maha dahsyat ini menyapu bersih daerah pesisir pantai Aceh sepanjang 800 kilometer. Akibat amukan alam ini, di Aceh saja tercatat sebanyak 132.000 orang meninggal dunia dan 37.000 jiwa dinyatakan hilang. Infrastruktur di daerah yang di lewati tsunami dapat di katakan hancur total. Daerah yang mengalami kerusakan paling parah adalah Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Besar, Aceh Barat, Simeulue, dan Singkil. Sebanyak 654 gampong (desa) rusak.¹⁰

Sedangkan pada tanggal 15 Agustus 2005 tercapai kesepakatan damai Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki di tandatangi oleh ketua tim perunding pihak pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta mediator Martti Ahtisaari. Tercapainya kesepakatan damai dalam lima tahap perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki merupakan berkah dari musibah gelombang tsunami akhir tahun 2004, sebagaimana di nyatakan dalam joint statement delegasi pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanggal 17 Agustus 2005. Tragedi tsunami telah menjadi satu faktor yang sangat memberikan kontribusi besar untuk menyamakan keinginan dan persepsi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Republik Indonesia.¹¹

Hal tersebut juga menjadi salah satu strategi jitu yang di dimanfaatkan oleh mantan kombatan GAM atau Panglima Sagoe untuk ikut serta mengawal

¹⁰ *Ibid*, hlm 162.

¹¹ *Ibid*, hlm 230-231.

jalannya pemerintahan. Hingga saat ini banyak mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka mendominasi keanggotaan dalam partai politik baik lokal maupun nasional yang keberadaannya tidak dapat dielakkan lagi. Banyak faktor yang menjadi penyebab hal demikian, salah satunya citra politik dan kepercayaan masyarakat yang sudah lama terbangun dari jejak histori perjuangan mereka dalam memperjuangkan nasib masyarakat Aceh.

Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah yang keberadaan panglima sagoe masih aktif dalam kelangsungan perpolitikan wilayah tersebut. Hal ini disebabkan aktifnya sebagian panglima sagoe di wilayah itu dalam menentukan sikap politik di Pilkada Aceh Selatan, bahkan hampir setiap kecamatan yang ada di kabupaten aceh selatan masih memiliki masing-masing panglima sagoe sendiri yang sangat aktif mengambil perannya. Demikian keberadaan panglima sagoe tersebut menjadi alasan kuat peneliti untuk meneliti terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap panglima sagoe dan perannya dalam Pilkada di Aceh Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini dirasa perlu mengangkat sebuah judul untuk melanjutkan penelitian tentang hal tersebut. Berikut judul yang ingin peneliti angkat; **“Pengaruh Panglima Sagoe Terhadap Pola Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Aceh Selatan 2018.”**

1.2.Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi dan dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh panglima sagoe terhadap pola partisipasi politik masyarakat Aceh Selatan pada pilkada 2018 ?
2. Bagaimakah peran panglima sagoe pada pilkada Aceh Selatan di tahun 2018 ?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap panglima sagoe sebagai orang yang berpengaruh pada pilkada Aceh Selatan tahun 2018 dan mengetahui sejauh mana peran panglima sagoe pada pilkada Aceh Selatan tahun 2018.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan bahwa ilmu politik bersifat terbuka dan dinamis.
2. Secara akademis, hasil-penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan referensi serta sebagai media informasi bagi Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah minat akademisi untuk lebih menggali peran seorang tokoh daerah di pilkada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Penelitian pertama ditulis oleh Arther Muhalling yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro”. Dalam penelitian ini membahas tentang Kabupaten Sitaro telah dua kali melaksanakan pemilukada secara langsung. Pemilihan yang kedua kalinya dilaksanakan pada tahun 2013 dari hasil rekapitulasi mencapai 95% masyarakat menggunakan hak pilihnya di kecamatan sibarsel kabupaten sitaro, oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana partisipasi politik masyarakat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di kabupaten sitaro khususnya kecamatan sibarsel dengan menggunakan teori Partisipasi politik, teori oleh Ramlan Surbakti, adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan lokasi penelitian di kecamatan sibarsel kabupaten sitaro dengan teknik mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi kepada informan yang telah ditentukan yaitu sebanyak 4 orang, dalam penelitian tersebut partisipasi masyarakat di kecamatan sibarsel cukup tinggi, Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan sibarsel didukung oleh berbagai hal yakni, antusiasme yang tinggi menyebabkan pemikiran kritis tentang pelaksanaan dan minat untuk berpartisipasi cukup tinggi, Peran media massa sangat strategis dalam mendorong pengetahuan masyarakat terhadap proses pemilihan umum kepala daerah sehingga

informasi berjalan cukup lancar dan menjadi salah satu sarana sosialisasi politik. Kinerja KPUD di tingkat Pilkada Kabupaten Sitaro yang cukup maksimal dalam melakukan kampanye agresif dalam mendorong minat individu pemilih. Hal inilah yang membuat partisipasi masyarakat meningkat dari pemilukada sebelumnya yaitu 82% pada tahun 2008.¹²

Penelitian kedua dilakukan oleh Ni Ketut Arniti yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar”. Dalam penelitian ini membahas tentang Penelitian yang berfokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar dalam tahun 2014. Partisipasi penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan umum Legislatif di Kota Denpasar Periode 2014-2019? Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, peta partisipasi pemilih dalam pileg dan pilpres di Kota Denpasar mengalami kenaikan dan penurunan. Kedua, upaya sosialisasi partisipasi politik yang merupakan bagian paling penting dalam sebuah pemilihan umum. Friedmen dan Hechter melihat adanya pengaruh lembaga sosial dalam partisipasi politik. Dalam temuan peneliti terdapat lembaga sosial yang turut berpengaruh dalam menaik-turunkan partisipasi politik masyarakat, yakni: Kepala Desa, Calon legislatif, PPS, dan tokoh

¹² Arther Muhalling, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro*, FISIP UNSRAT Manado.s

agama. Ketiga, kedekatan emosional calon pileg dan pilpres turut mempengaruhi partisipasi dan persepsi politik masyarakat. Keempat, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Namun, kedekatan calon dengan pemilih menjadi kunci signifikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat.¹³

Penelitian ketiga dilakukan oleh Lidya Zakarias dengan judul Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi utara tahun 2015 (Study Di Kelurahan Kolongan Behar Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe). Dalam penelitian ini menjelaskan Faktor-faktor penghambat partisipasi politik pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015, di Kelurahan Kolongan Beha adalah tidak berada di tempat, faktor Administratif, kurangnya kesadaran pemilih dan peran kandidat. Sedangkan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 adalah : Kesadaran Politik, Media massa dan pengaruh orang lain.¹⁴

Penelitian keempat dilakukan oleh Samsul Bahri dengan judul Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau putaran ke dua di kota pekan baru tahun 2018. Dalam penelitian ini menjelaskan

¹³ Ni Ketut Arniti, 2020, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar*, Universitas Pendidikan Nasional.

¹⁴ Lidya Zakarias, 2018, Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi utara tahun 2015 (Study Di Kelurahan Kolongan Behar Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe)

bahwa Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Putaran ke dua yang lalu tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki rendah hal ini turun dibandingkan putaran pertama. Pada putaran kedua masyarakat yang ikut memilih hanya 34,61 %. Hal ini menggambarkan bahwa minat masyarakat dalam berpartisipasi mengalami penurunan.¹⁵

Penelitian kelima dilakukan oleh Sondakh Gideon Repi dengan judul Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 (Study Di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Yang menjadi factor penghambat Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur tahun 2015 di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa terdiri dari beberapa factor diantaranya : Faktor Pemerintah terkait dengan keberadaan peraturan perundangan, factor penyelenggara baik KPUD maupun PANWASDA serta keberadaan dari partai politik yang menjadi peserta atau pengusung dari calon yang berkompetisi.¹⁶

¹⁵ Samsul Bahri, 2019, Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau putaran ke dua di kota pekan baru tahun 2018

¹⁶ Sondakh Gideon, 2018, Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 (Study Di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa).

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Partisipasi Politik

2.2.2. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan konsep yang sudah populer dalam ilmu politik, namun demikian penggunaannya sering bermacam-macam sehingga menimbulkan pemahaman konsep yang berbeda-beda. Sekalipun demikian, sebagian besar ilmuan politik sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik itu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak di dalam kegiatan mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Menurut Gabriel Almond mengemukakan bahwa partisipasi politik muncul karena diawali dengan adanya artikulasi kepentingan dari seorang individu. Peran mereka aggregator politik (penghalang/penyatu dukungan), maka hal itu akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi selanjutnya.

2.2.3. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk dan Derajat Partisipasi Politik Almond

a. Voting (pemberian suara)

Voting dalam hal ini adalah pemberian suara dalam pemilihan umum (pemilu), voting mempunyai ruang lingkup yang luas, fungsi dari voting (pemberian suara) ini adalah

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karenanya masyarakat mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui kegiatan voting ini. Dalam hal ini derajat partisial politiknya termasuk dalam kategori sedang.

- b. Informal group (kelompok informal) dan social Movement (pergerakan sosial).

Bentuk partisipasi politik ini adalah berupa kegiatan dari kelompok-kelompok tertentu, yang bertujuan menyalurkan aspirasi mereka serta untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan perkumpulan-perkumpulan organisasi tertentu guna membahas berbagai masalah yang sedang dihadapi dan mencari jalan keluarnya.

Bentuk partisipasi politik ini termasuk dalam derajat partisipasi politik yang tinggi, karena hanya sedikit orang yang terlibat di dalamnya termasuk dalam kategori derajat partisipasi politik yang tinggi.

- c. Direct contact (kontak langsung) R Y

Bentuk partisipasi politik ini lebih bersifat personal digunakan untuk kepentingan personal/pribadi, oleh karena itu tingkatan dan derajat partisipasi politik ini termasuk dalam kategori rendah, karena hanya untuk kepentingan pribadi saja.

d. Protes activity (aktivitas protes)\

Bentuk partisipasi politik ini timbul lantaran ketidakpuasan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Bentuk partisipasi ini bisa berupa demonstrasi atau bahkan juga bisa kekerasan.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan yang diambil pemerintah. Bentuk partisipasi politik ini menurut Almond termasuk dalam kategori derajat partisipasi politik yang tinggi. Karena dari kalangan warga negara tidak banyak yang melakukan kegiatan ini, hanya beberapa orang atau kelompok saja yang melakukannya.

2.2.4. Kelompok-Kelompok Dalam Partisipasi Politik

Gabriel Almond membagi kelompok kepentingan ke dalam empat kategori, yaitu :

a. Kelompok Anomi

Kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi orang-orang yang terlibat didalamnya mempunyai rasa ketidakpuasan yang sama. Hal ini yang kemudian menimbulkan suatu gerakan massal, bersama dengan orang-orang yang merasa tidak puas atas suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Contoh dari tindakan atau aktivitas ini adalah melakukan demonstrasi dan pemogokan, bahkan tidak jarang demonstrasi yang dilakukan berujung pada suatu tindakan kekerasan.

b. Kelompok Nonasosiasional

Kelompok ini timbul karena adanya rasa solidaritas yang tinggi antar saudara, kelompok etnis, kerabat, dan pekerjaan. Kelompok-kelompok ini biasanya tidak aktif dalam aktivitas atau kegiatan perpolitikan, anggota-anggotanya merasa mempunyai hubungan batin yang lebih mendalam. Contoh kelompok ini adalah: peguyuban pedagang kaki lima, dan kelompok penggemar kopi.

c. Kelompok Institusional

Kelompok-kelompok ini sifatnya formal, keberadaannya lebih bersifat resmi dan mempunyai struktur organisasi yang lebih jelas. Contoh dari kelompok-kelompok ini adalah : PGRI, PPNI, Dharma Wanita, dan KORPRI.

d. Kelompok Asosional

Kelompok ini mempunyai suatu organisasi yang baik, dibentuk dengan tujuan yang lebih jelas dan terarah. Sehingga hal ini menjadikan kelompok ini lebih efektif dari pada kelompok-kelompok lain dalam memperjuangkan tujuan mereka. Contoh : Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Federasi Persatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan suatu kelompok masyarakat yang lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial. LSM sangat berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya pada golongan masyarakat menengah ke bawah. LSM juga berperan dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang diambil pemerintah.

2.3. Konsep Elektabilitas

Menurut Dendy Sugiono (2008, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hlm. 29) menjelaskan tentang Elektabilitas sebagai berikut: Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai politik dapat kita ukur melalui citranya, sehingga pembahasan mengenai elektabilitas dan citra politik ini dianggap relevan. Elektabilitas Dalam dunia politik terdapat konsep mengenai elektabilitas. Maka, sosok atau institusi yang elektabilitas adalah sosok/institusi yang mendapatkan simpati dan empati dari banyak orang, sehingga orang banyak berkeinginan untuk memilih atau bahkan memilikinya. Popularitas

lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik dalam arti positif, ataupun negatif.

Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Memang kedua konstataasi ini ada benarnya. Tapi tidak selalu demikian. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Adakalanya berbalikan.

Elektabilitas dijadikan tolak ukur utama suatu keberhasilan, orang atau instansi yang berkualitas tetapi tidak berada dalam lingkaran kekuasaan pun menjadi tersisih. Sebaliknya, mereka yang berada dalam posisi pusat perhatian akan menjadi rebutan. Kondisi ini disuburkan oleh kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia yang sebagian besar belum sadar politik dan berpendidikan rendah serta rendahnya partisipasi politik masyarakat. Ada beberapa indikator utama yang membuat seorang figur dikatakan populer, antara lain, sedang menduduki posisi strategis, sering muncul di berbagai media massa, dan citranya positif dengan karakter dan sikap yang kuat. Pemerintah atau institusi yang berelektabilitas, dengan sendirinya diterima dan didukung oleh mayoritas rakyat, karena mereka mengenal tokohnya secara perseorangan dan mempercayainya secara keseluruhan, bahwa nilai dan kepentingan mereka akan terlindungi serta terpenuhi. Pemerintah dipercaya mampu secara politis dan teknis

untuk menangani masalah. Maka, pemerintah menjadi kuat dan berwibawa. Kuat, berarti punya dukungan luas. Berwibawa, berarti diikuti rakyat keputusan atau kebijaksanaannya.

Pada gilirannya, dukungan dan wibawa itu mempengaruhi sikap rakyat terhadap cara dan hasil kerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dampaknya kepada penyelesaian masalah kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya. Pemerintah yang populer, tetap saja didukung rakyat, sekalipun pelaksanaan tugasnya belum atau tidak cukup berhasil memenuhi nilai dan kepentingan rakyat pendukungnya. Rakyat bersedia menunggu hasil pemecahan masalah yang dijanjikan pemerintah. Menurut pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf bahwa elektabilitas tinggi tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada faktor pendukung lain.

Dukungan partai, data survei internal partai, serta kebijakan partai yang secara hierarki umumnya harus ditentukan oleh keputusan pengurus di tingkat pusat masing-masing partai. Bila kita memaknai beberapa pengertian elektabilitas yang tertera diatas maka dapat dibuat suatu asumsi bahwa elektabilitas meliputi: perilaku, pribadi, sikap dan persepsi. Perilaku berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan, sedangkan pribadi dan sikap berkaitan dengan perasaan dan emosi, dan persepsi berkaitan dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Olehnya itu tingkat elektabilitas dapat diukur dengan

memperhatikan unsur pengetahuan, sikap dan dukungan yang dimiliki oleh kahalayak.

2.4. Teori Modal

Teori modal dicetuskan pertama kali oleh Piere Bourdieu. Disebutkan bahwa teori ini mempunyai ikatan erat dengan persoalan kekuasaan. Oleh karenanya pemikiran Bourdieu terkonstruksi atas persoalan dominasi. Dalam masyarakat politik tentu persoalan dominasi adalah persoalan utama sebagai salah satu bentuk aktualisasi kekuasaan. Pada hakikatnya dominasi dimaksud tergantung atas situasi, sumber daya (kapital) dan strategi pelaku.¹⁷

Modal dalam pandangan Bourdieu sebagai basis dominasi, maka dalam sebuah kontestasi pemilukada modal yang dimiliki setiap kandidat sangat menentukan kemenangan.¹⁸

2.4.1. Modal Ekonomi

Modal ekonomi adalah sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Modal ekonomi ini merupakan jenis modal yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk-bentuk modal lainnya. Modal ekonomi ini mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda), dan uang. Semua jenis modal ini mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan

¹⁷ Syahrin B. Kamahi. *Transformasi identitas etnis sebagai modal politik dalam kontestasi politik*. Jurnal Program Studi Ilmu Politik Vol. IX No. 1 April 2020.

¹⁸ Syahrin B. Kamahi. *Transformasi identitas etnis sebagai modal politik dalam kontestasi politik*. Jurnal Program Studi Ilmu Politik Vol. IX No. 1 April 2020.

dari generasi ke generasi selanjutnya. Sebenarnya modal ekonomi ini adalah tradisi Marxian. Bentuk-bentuk modal didefinisikan dengan merujuk pada penguasaan ekonomi. Konsepsi Marxian tentang modal dianggap terlalu menyempitkan pandangan atas gerak sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun Bourdieu tetap menganggap penting modal ekonomi, yang di antaranya adalah alat-alat produksi (mesin, tanah, tenaga kerja), materi (pendapatan, benda-benda), dan uang. Modal ekonomi merupakan modal yang secara langsung bisa ditukar, dipatenkan sebagai hak milik individu. Modal ekonomi merupakan jenis modal yang relatif paling independen dan dan fleksibel karena modale ekonomi secara mudah bisa digunakan atau ditransformasi ke dalam ranah-ranah lain serta fleksibel untuk diberikan atau diwariskan pada orang lain.¹⁹

Merujuk pada modal ekonomi yang di kemukakan oleh Bourdieu ini maka penulis menganalisa modal ini juga di miliki oleh para panglima sago yang di mana rata-rata mereka mempunyai modal ekonomi yang cukup seperti pendapatan, harta benda, tanah sehingga hamper semua dari mereka ekonominya di atas rata-rata.

2.4.2. Modal Kultural

Modal kultural adalah ke seluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga,

¹⁹ Syahrin B. Kamahi. *Transformasi identitas etnis sebagai modal politik dalam kontestasi politik*. Jurnal Program Studi Ilmu Politik Vol. IX No. 1 April 2020.

seperti kemampuan menampilkan diri di depan publik, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu hasil pendidikan formal, sertifikat (termasuk gelar sarjana). Contoh lain modal kultural adalah kemampuan menulis, cara pembawaan dan cara bergaul yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial. Dengan demikian modal kultural merupakan representasi kemampuan intelektual yang berkaitan dengan aspek logika, etika, maupun estetika.²⁰

2.4.3. Modal Sosial

Teori modal sosial pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Bourdieu pada tahun 1972 dan Coleman tahun 1988 (Hauberer, 2011). Definisi mendasar yang diperkenalkan adalah modal sosial merupakan sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial. Individu yang terlibat dalam hubungan sosial dapat mempergunakan sumber daya sosial ini untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sejumlah intelektual menggunakan teori modal sosial sebagai salah satu bahan diskusi penting yang mempertemukan berbagai disiplin ilmu. Modal sosial terbentuk dari hubungan sosial antar manusia, sehingga besaran modal sosial tergantung dari kapabilitas sosial tiap individu. Kapabilitas sosial mempunyai peran yang sama penting dengan modal pembangunan lainnya (OECD, 2011). Ini yang menyebabkan modal sosial sering dianggap sebagai perekat yang

²⁰ Syahrin B. Kamahi. *Transformasi identitas etnis sebagai modal politik dalam kontestasi politik*. Jurnal Program Studi Ilmu Politik Vol. IX No. 1 April 2020.

memungkinkan modal pembangunan lainnya berkerja secara efektif dan efisien. Modal sosial bersama modal manusia secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia, tetapi keduanya juga berperan melalui modal pembangunan lainnya dalam bentuk kapabilitas manusia dan sosial.²¹

Modal sosial adalah segala jenis hubungan sebagai sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial. Modal sosial termanifestasikan melalui hubungan-hubungan dan jaringan hubungan-hubungan yang merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukankedudukan sosial. Modal sosial atau jaringan sosial ini dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa (Bourdieu: 1993).²²

Dari teori ini lah penulis menganalisa bahwa bahwa modal social yang kuat yang di miliki sosok panglima sagoe menjadi salah satu senjata yang kuat sehingga di percaya dan menjadi arah politik masyarakat.apalagi masyarakat di sana masih begitu fanatic dengan sosok yang pernah berjuang untuk kemerdekaan aceh beberapa tahun lalu.

²¹ Michael Grenfell, *Pierre Bourdieu Agent Provocateur*, London: Continuum, 2004, Hlm 28.

²² Syahrin B. Kamahi. *Transformasi identitas etnis sebagai modal politik dalam kontestasi politik*. Jurnal Program Studi Ilmu Politik Vol. IX No. 1 April 2020.

2.4.4. Modal Simbolik

Modal simbolik adalah jenis sumber daya yang dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, status tinggi, dan keluarga ternama. Artinya modal simbolik di sini dimaksudkan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional atau non-institusional. Simbol itu sendiri memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas, yang mampu menggiring orang untuk mempercayai, mengakui dan mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai politik, atau sebuah bangsa. Proses kuasa simbolik bisa disebut terjadi saat otonomi ranah tersebut melemah sehingga memungkinkan munculnya pemikiran lain yang disampaikan agen-agen dalam ranah tersebut untuk mempertanyakan, menantang, atau bahkan menggantikan doksa yang dimaksud. Pada titik ini, Bourdieu menyebut konsep heterodoksa dan ortodoksa. Pemikiran “yang menantang” tersebut disebutnya sebagai heterodoksa, yaitu pemikiran yang disampaikan secara eksplisit yang mempertanyakan sah atau tidaknya skema persepsi dan apresiasi yang tengah berlaku. Sedangkan ortodoksa merujuk pada situasi di mana doksa dikenali dan diterima dalam praktik. Dengan kata lain, kelompok dominan yang memiliki kuasa berusaha mempertahankan struktur ranah yang didominasinya dengan memproduksi ortodoksa²³

²³ Syahrin B. Kamahi. *Transformasi identitas etnis sebagai modal politik dalam kontestasi politik*. Jurnal Program Studi Ilmu Politik Vol. IX No. 1 April 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan awal penelitian dan menjadi rujukan untuk langkah apa yang harus diambil untuk menyikapi data yang didapat. Hal lainnya, metode kualitatif digunakan karena dapat mencoba masuk lebih dalam untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.²⁴ Metode kualitatif yang digunakan untuk memberikan/mencari penjelasan atas alasan mengapa ada permasalahan yang diangkat oleh penulis. Data penelitian didapatkan dengan cara langsung terjun ke lapangan dan bersentuhan langsung dengan field of reseacrh, di mana penulis berkomunikasi langsung dengan sumber data atau narasumber.²⁵

3.2. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu : “Pengaruh Panglima Sagoe Terhadap Pola Partisipasi Masyarakat Di Pilkada Aceh Selatan 2018”.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan dan elemen- elemen penting dalam penelitian, karena dengan adanya lokasi penelitian maka tujuan dan objek mudah diterapkan sehingga

²⁴ Jane Ritchie dan Jane Lewis, *Qualitative Research Practice*, London: SAGE Publications, 2003, hlm. 47-75.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm 19

dapat mempermudah berjalannya penelitian. Mengingat keterbatasan para peneliti untuk mengakses keseluruhan dari Aceh Selatan maka Penelitian akan dilakukan di kecamatan Kluet Utara karena kluet utara merupakan salah satu kecamatan paling berpengaruh di aceh selatan tak hanya dari segi jumlah penduduk juga dari segi banyak nya tokoh yang berpengaruh di kecamatan kluet utara.

3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi serta latar belakang dari pembahasan yang ingin diteliti. Informan penelitian adalah orang-orang yang memahami dan mengerti tentang objek penelitian.²⁶

No	Nama	Jumlah
1	Panglima Sagoe	1
2	Tokoh Masyarakat	1
3	Masyarakat Biasa	1

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan disini adalah data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah jenis pengumpulan data yang diperoleh pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dimana penelitiannya adalah instrument kunci.²⁷

²⁶Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2007, Hlm 85.

²⁷ Albi anggito, *Metodologi penelitian kualitatif*, Jawa barat, Cv jejak, 2018, Hlm 8.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat oleh peneliti dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁸

3.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen-dokumen elektronik, foto-foto, dan gambar yang dapat mendukung dalam hal proses penulisan. Dimana hasil penelitian akan terpercaya apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Dikatan studi pustaka apabila dapat mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.²⁹

b. Wawancara Langsung R A N I R Y

Wawancara Langsung adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Selain itu juga, wawancara atau interview juga berarti tanya jawab

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, Jakarta, Rajawali, 1987, Hlm 94.

²⁹ Sugiyono, *Metode penelitian bisnis*, Bandung, Alfabeta, 2005, Hlm 83.

lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan ketua Timses sekaligus Sekum Persiraja, Timses, dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, internet dan sebagainya.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, teknik analisa data adalah proses mencari data dan kemudian menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah di pahami dan kemudian temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.³¹

Tahapan-tahapan dalam menganalisa data dalam skripsi ini adalah mengumpulkan data hasil wawancara dari beberapa sampel, kemudian di proses melalui rekaman, pencatatan, pengetikan, dan kemudian di analisa. Setelah di analisa, kemudian di ambil suatu kesimpulan, tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang di perluas dan kemudian di laporkan dalam bentuk laporan penelitian.³²

³⁰ Sugiyono, *Metode penelitian bisnis*, Bandung, Alfabeta, 2005, Hlm 83.

³¹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R & D*, Bandung, Elfabeta, 2007, Hlm 244.

³² Hamid Patilima. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta. Hal. 100.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Letak Geografis Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu Kabupaten yang tergolong tertua di Provinsi Aceh. Perjuangan untuk meningkatkan status Aceh Selatan menjadi sebuah Kabupaten telah di mulai sejak tanggal 10 Oktober 1945 dengan Pembentukan Komite Nasional Kewedanaan Tapaktuan yang dikenal dengan KNID. Usaha ke arah itu terus dilanjutkan dengan mencari dukungan dari Komite Nasional Daerah Aceh dan Komite Nasional Daerah Bakongan serta Singkil. Pembicaraan ketua KNID Tapaktuan yang diketuai oleh Ahmad Banuali mendapat sambutan dan persetujuan dari residen Aceh T. Nyak Arief dan Ketua Komite Nasional Daerah Aceh Tuanku Mahmud dengan catatan pemekaran itu hanya untuk tiga kewedanaan yaitu Tapaktuan, Bakongan dan Singkil. Kemudian setelah penggantian Residen Aceh dari T. Nyak Arief kepada T. Chik M Daud Syeh pembicaraan dilanjutkan dan diperoleh izin prinsip : Pada saat Komite Nasional Daerah KNID Tapaktuan telah berhasil memilih Bupati Aceh Selatan, maka pada saat itu Kabupaten Aceh Selatan resmi di bentuk. Untuk melanjutkan proses tersebut maka pada tanggal 18 Mei 1946 diadakan rapat pemilihan Bupati Aceh Selatan yang pertama dan pemilihan Bupati pun dilaksanakan dengan

perolehan suara terbanyak oleh M. Salim Hasyimi, dengan demikian resmilah lahirnya Kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten otonom.³³

Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Sesuai dengan namanya, Aceh Selatan terletak di daerah Selatan Aceh. Aceh Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, oleh sebab itu, iklim di daerah Aceh Selatan relatif panas. Meskipun begitu, Aceh Selatan selalu jarang dilanda kekeringan. Aceh Selatan seperti terjepit, karena diapit oleh Pegunungan Bukit Barisan dan Samudra Hindia. Letak astronomisnya pada 2 derajat - 4 derajat LU, 96 derajat - 98 derajat BT. Luas wilayah Aceh Selatan sekitar 7% dari luas Provinsi Aceh, dan memiliki kira-kira 250 desa. Suhu udara di Aceh Selatan berkisar antara 28 derajat - 33 derajat. Curah hujan Aceh Selatan berkisar antara 2000 sampai 3700 mm/tahun. Kecepatan angin di Aceh Selatan berkisar 9 - 14 knot.³⁴

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2002 resmi dimekarkan sesuai dengan UU RI Nomor 4 tahun 2002 menjadi tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan

³³ Bappeda Aceh Selatan

³⁴ "Perpres No. 10 Tahun 2013".

Labuhan Haji, diikuti oleh Kecamatan Kluet Utara. Sementara jumlah penduduk tersedikit adalah Kecamatan Sawang. Sebagian penduduk terpusat di sepanjang jalan raya pesisir dan pinggiran sungai.³⁵

4.1.2 Batas Wilayah

Adapun batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.³⁶

4.1.3 Etnik

Dari sekian banyak Kecamatan di Kabupaten penghasil pala tersebut terdapat tiga etnik atau suku yang telah ada sejak lama. Suku tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Suku Aneuk Jamee Suku Aneuk Jamee tersebar di sepanjang pesisir Barat-Selatan Aceh. Dialek yang digunakan suku Aneuk Jamee diperkirakan masih merupakan dialek dari bahasa Minangkabau dan menurut cerita, mereka memang berasal dari Minang Kabau. Bahasa yang digunakan bukan bahasa padang lagi tapi bahasa Jamee, mirip tapi tidak persis sama. Dalam bahasa Aceh kata “jamee” berarti tamu atau pendatang.

³⁵ ibid

³⁶ ibid

- b. Suku Kluwat (Suku Kluet) Suku Kluwat juga merupakan salah satu suku yang berada di Aceh Selatan, suku ini paling banyak tersebar di Kecamatan Kluet Timur, Kluet Utara dan Kecamatan Kluet Tengah.
- c. Suku Aceh Suku Aceh merupakan suku mayoritas yang terdapat di Aceh Selatan, jika ditotalkan sekitar 60% masyarakat disana bersuku Aceh, dan selebih berasal dari suku Aneuk Jamee dan Kluwat³⁷

4.1.4. Sosial Keagamaan

Berbicara agama di Kabupaten Aceh Selatan bisa dipastikan 99,99% penganut agama Islam, hal ini pertama sekali terjadi saat masuknya Islam pertama sekali di Samudera Pasai melalui jalur perdagangan. Khusus untuk Aceh Selatan tidak semua masyarakat murni menganut Islam karena ada sebagian kecil yang memeluk agama lain, mereka adalah orang-orang Cina yang berstatus sebagai pendatang disana, paling banyak terdapat di kota Tapaktuan yang berprofesi sebagai pedagang³⁸

4.1.5. Kecamatan

Kabupaten Aceh Selatan memiliki 18 buah Kecamatan yang terbentang mulai dari Kecamatan Labuhan Haji yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya hingga Kecamatan Trumon Timur yang berbatasan dengan Kota Subulussalam. Pada tahun 2010 jumlah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan adalah 16 Kecamatan. Pada tahun 2011, 2 Kecamatan di bagian Timur yakni Trumon dimekarkan lagi menjadi 2 Kecamatan lagi sehingga

³⁷ ibid

³⁸ ibid

keseluruhan Kecamatan dalam Kabupaten sekarang ini berjumlah 18 Kecamatan.

4.1.6 Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Aceh Selatan terbagi berdasarkan letak tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Secara umum jika dikelompokkan maka dapat dibagi menjadi 4 yaitu:

- a. Bertani, Aceh Selatan terkenal sebagai kabupaten penghasil pala terbanyak di Provinsi Aceh, selain itu tanaman lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat seperti, kelapa, kelapa sawit, kopi, pinang, karet, cengkeh dan nilam sangat luas terbentang dari Kecamatan Labuhanhaji Barat hingga Trumon Timur.
- b. Melaut, mata pencaharian sebagai nelayan ini tersebar disepanjang pesisir Kabupaten Selatan mulai dari Labuhan Haji hingga Bakongan, dan terbanyak yang berprofesi sebagai nelayan terdapat di Kecamatan Labuhan Haji, Sawang dan Kecamatan Bakongan
- c. Berdagang, masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di Aceh Selatan Tersebar di tiap-tiap Kecamatan yang ada, terutama di jalan lintasan Medan-Banda Aceh. Profesi ini terlihat semakin tahun semakin meningkat jumlahnya, dipusat-pusat Kecamatan sudah terlihat banyak pedagang yang membuka usahanya dengan skala besar (grosir).
- d. Pegawai, Pemerintahan Selain tiga mata pencaharian di atas, Aceh Selatan juga mempunyai banyak masyarakat yang bekerja sebagai

pegawai pemerintahan, mereka itu adalah orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi, dan setiap tahun jumlahnya terus meningkat.³⁹

4.1.7. Pendidikan dan Kesehatan

Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2014, di Kabupaten Aceh Selatan terdapat 235 unit Sekolah Dasar (SD)/ sederajat, 72 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat, 48 unit Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat. Sementara itu, jumlah tenaga pengajar yang tersedia untuk masing-masing jenjang pendidikan yakni 2.632 pengajar pada tingkat SD/ sederajat, 1.327 pengajar pada tingkat SMP/ sederajat dan 1.112 pengajar pada tingkat SMA/ sederajat. Sedangkan untuk peserta didiknya ada 21.970 murid SD/ sederajat, 10.261 murid SMP/ sederajat, dan 10.154 murid SMA/ sederajat. Dari angka tersebut, secara kasar dapat terlihat beban mengajar guru pada masing-masing jenjang, yakni 8 orang pada tingkat SD, 8 orang pada tingkat SMP dan 9 orang pada tingkat SMA. Kabupaten Aceh Selatan telah memiliki fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan rumah sakit. Semua kecamatan telah memiliki puskesmas masing-masing 1 unit dan Pustus 53 unit tahun 2014. Jumlah puskesmas sebanyak 23 unit. Disamping itu, terdapat juga 316 unit posyandu aktif yang dibantu 1.322 orang kader aktif yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Adapun tenaga kesehatan berjumlah 473 orang

³⁹ ibid

pada tahun 2014 yang tersebar relatif merata di setiap kecamatan, rumah sakit, dan dinas kesehatan.⁴⁰

4.2. Pengaruh Panglima Sagoe Terhadap Pola Partisipasi Politik Masyarakat Aceh Selatan Pada Pilkada 2018

Untuk melihat Pengaruh Panglima Sagoe Terhadap Pola Partisipasi Politik Masyarakat Aceh Selatan Pada Pilkada 2018 dapat diukur dari keterlibatan Panglima Sagoe tersebut dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik pada pilkada di Aceh Selatan tahun 2018 silam. Seperti Panglima sagoe mampu memberi dampak positif terhadap masyarakat untuk ikut berpolitik dan berpartisipasi dalam pilkada. Hal tersebut menandakan bahwa panglima sagoe memiliki pengaruh penting dalam masyarakat Aceh Selatan, dimana panglima sagoe sangat di hormati dan suaranya didengar oleh masyarakat Aceh Selatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu Tokoh Masyarakat Aceh Selatan dalam wawancaranya:

Kami masyarakat Aceh Selatan sangat menghargai dan menghormati Panglima Sagoe. Pengaruhnya sangat besar terhadap kami, biasanya beliau akan memberikan nasehat dan masukan-masukan untuk masyarakat Aceh Selatan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memajukan daerah Aceh selatan terkhusus untuk mensejahterakan masyarakat Aceh Selatan. Ada beberapa orang yang ikut berpartisipasi dalam dunia politik karena mendapat dukungan dari pihak panglima sagoe.⁴¹

⁴⁰ Bappeda Aceh Selatan

⁴¹ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Selatan di Aceh pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa pengaruh yang diberikan oleh Panglima Sagoe dalam menentukan sikap masyarakat terhadap ikut berpartisipasi dalam dunia perpolitikan di Aceh Selatan sangat tergantung dari dukungan yang diberikan oleh Panglima Sgoe tersebut, dimana masyarakat sangat menghormati dan mendengar suara serta arahan dari panglima sagoe.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu masyarakat Aceh Selatan bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Selatan berminat ikut berpartisipasi dalam pilkada dan dunia perpolitikan di Aceh Selatan salah satunya karena adanya dukungan dan dorongan dari Panglima Sagoe untuk ikut terlibat dalam pilkada. Sehingga dengan kepercayaan yang diberikan oleh panglima sagoe tersebut masyarakat tergerak dan memberanikan diri untuk ikut terlibat dalam setiap pilkada yang dilaksanakan di Aceh Selatan. Hal ini disampaikan oleh salah satu masyarakat Aceh Selatan dalam wawancaranya:

Masyarakat Aceh selatan sangat menghormati dan mendengar apa yang dikatakan oleh panglima sagoe. Jika beliau sudah mendukung dan mendorong kami untuk ikut berpartisipasi pada setiap kontestasi politik yang dilaksanakan di Aceh Selatan, maka kami akan ikut apa kata beliau tersebut. Hal ini kami lakukan karena rasa percaya kami dan rasa hormat kami kepada panglima sagoe.⁴²

⁴² Wawancara dengan Masyarakat Aceh Selatan pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa panglima sagoe mampu mempengaruhi masyarakat Aceh selatan untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi politik yang diadakan di Aceh Selatan. Masyarakat Aceh Selatan sangat mempercayai dan mendengar apa yang disarankan oleh panglima sagoe. Hal ini menandakan pengaruh panglima sagoe di masyarakat Aceh Selatan sangat besar .

Hal serupa juga diungkapkan oleh Panglima Sagoe dalam wawancaranya bahwa kepercayaan masyarakat terhadap panglima sagoe sangatlah besar. Jika panglima sagoe berkata jangan maka masyarakat tidak akan berbuat hal tersebut. Hal ini disebabkan karena rasa hormat masyarakat terhadap kehadiran panglima sagoe di Aceh Selatan. Oleh karena itu panglima sagoe sangat berhati-hati dalam memberi masukan dan saran kepada masyarakat Aceh Selatan. Pihak Panglima Sagoe sangat mendukung setiap keinginan masyarakat yang ingin terlibat dalam dunia perpolitikan di Aceh Selatan. Pihak panglima sagoe akan memberi saran dan masukan kepada setiap calon ataupun kandidat yang akan bertarung dalam pilkada, seperti yang terjadi pada pilkada tahun 2018 silam. Hal ini disampaikan oleh Panglima Sagoe dalam wawancaranya:

Masyarakat Aceh Selatan sangat menghormati dan mendengar apa yang Panglima Sagoe katakan. Oleh karena itu untuk mengeluarkan pendapat pihak kami sangat berhati-hati. Panglima sagoe juga akan sangat mendukung apabila ada masyarakat Aceh Selatan yang berniat maju ke kontestasi politik yang diadakan di Aceh Selatan. Kami akan memberikan masukan dan nasehat-

nasehat. Ini dilakukan agar masyarakat termotivasi dan terdorong untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan politik yang dilakukan, seperti pilkada tahun 2018 silam.⁴³

Dapat dilihat dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak Panglima Sagoe sangat dihargai dan dihormati di kalangan masyarakat Aceh Selatan. Sehingga setiap pendapat yang dikeluarkan oleh panglima sagoe harus sangat hati-hati. Pihak panglima sagoe juga sangat mendukung masyarakatnya yang berniat ikut dalam kontestasi pilkada yang di adakan di Aceh Selatan, seperti pilkada 2018 silam.

Selain itu Panglima sagoe juga mendapat kepercayaan dari masyarakat sangat dipengaruhi oleh jejak historis masa lalu. Jejak historis tersebut mampu mempertahankan posisi Panglima Sagoe dalam pemerintahan dan di hati masyarakat Aceh Selatan. Sehingga setiap permasalahan yang terjadi berkaitan dengan dunia politik pendapat panglima sagoe akan dipertimbangkan dan menjadi solusinya. Tidak hanya itu panglima sagoe dengan nilai sejarahnya mampu menjadi orang yang sangat dihargai dan dihormati di Aceh Selatan. Dengan begitu suara panglima sagoe akan sangat didengar oleh masyarakat Aceh Selatan. Hal ini mampu memberi pengaruh pada setiap kalangan masyarakat Aceh selatan yang akan ikut berpartisipasi dalam pilkada dan dunia perpolitikan di Aceh Selatan. Seperti pada pilkada 2018 lalu, hal ini disampaikan oleh Panglima Sagoe dalam wawancaranya:

⁴³ Wawancara dengan Panglima Sagoe Aceh Selatan pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

Setiap masyarakat yang ingin mencalonkan diri pada konstestasi politik di Aceh Selatan pasti berkunjung kemari untuk meminta saran dan masukan dari panglima sagoe. Mereka percaya dengan kami karena jejak historis masa lalu. Selain itu panglima sagoe sangat aktif di dunia perpolitikan, jadi setiap ada permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan politik pasti kami akan di cari untuk dimintai pendapat dan saran dimana saran dan pendapat dari panglima sagoe akan menjadi bahan pertimbangan untuk mencari solusi dari permasalahan yang muncul. Seperti yang terjadi pada pilkada 2018 lalu.⁴⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa kehadiran panglima sagoe sangat penting di kalangan masyarakat Aceh Selatan yang hendak ikut berpartisipasi dalam pilkada tahun 2018 silam. Tidak hanya panglima sagoe dengan nilai sejarahnya mampu menjadi orang yang sangat dihargai dan dihormati di Aceh Selatan. Dengan begitu suara panglima sagoe akan sangat didengar oleh masyarakat Aceh Selatan. Hal ini mampu memberi pengaruh pada setiap kalangan masyarakat Aceh selatan yang akan ikut berpartisipasi dalam pilkada dan dunia perpolitikan di Aceh Selatan. Seperti yang terjadi pada pilkada tahun 2018 silam.

Kemudian hal senada juga disampaikan oleh salah Tokoh masyarakat Aceh Selatan bahwa rasa percaya masyarakat Aceh Selatan kepada panglima sgoe sangat besar. Hal ini tidak lain karena jejak sejarah terbentuknya panglima sagoe di Aceh Selatan dan aktifnya panglima sagoe dalam dunia perpolitikan di Aceh Selatan. Sehingga masyarakat yang akan

⁴⁴ Wawancara dengan Panglima Sagoe Aceh Selatan pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

berpolitik akan meminta saran dari panglima sago. Selain itu panglima sago juga mendapatkan keistimewaan sendiri dalam hati masyarakat Aceh Selatan sehingga masyarakat pasti akan memilih kandidat yang dukung oleh panglima sago, seperti yang dilakukan pada pilkada tahun 2018 lalu. Hal ini diungkapkan oleh Salah satu Tokoh Masyarakat Aceh Selatan dalam wawancaranya:

Rasa percaya masyarakat Aceh Selatan kepada panglima sago sangat besar, ini tidak lain karena jejak sejarah terbentuknya panglima sago di Aceh Selatan dan aktifnya panglima sago dalam dunia perpolitikan di Aceh Selatan. Sehingga masyarakat yang akan berpolitik akan meminta saran dari panglima sago. Selain itu panglima sago juga mendapatkan keistimewaan sendiri dalam hati masyarakat Aceh Selatan sehingga masyarakat pasti akan memilih kandidat yang dukung oleh panglima sago, seperti yang dilakukan pada pilkada tahun 2018 lalu.⁴⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa masyarakat sangat percaya kepada panglima sago. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang akan bertarung dalam dunia perpolitikan akan meminta saran kepada panglima sago. Seperti yang terjadi pada pilkada Aceh Selatan tahun 2018 silam kandidat yang mencalonkan diri mencari dukungan dari panglima sago, karena panglima sago dipercayai diistimewakan oleh masyarakat Aceh Selatan. Sehingga kandidat akan

⁴⁵ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Aceh Selatan pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

dengan mudah untuk mendapatkan suara masyarakat pada pilkada 2018 tersebut.

Selanjutnya menurut masyarakat Aceh Selatan bahwa benar saat ada yang ingin maju dalam pilkada atau perpolitikan di Aceh Selatan pasti akan mendatangi panglima sagoe untuk meminta saran dan pendapat serta dukungan dari panglima sagoe. Hal ini karena calon kandidat percaya bahwa dukungan dari panglima sagoe akan dapat memenangkan calon kandidat pada pilkada, hal tersebut dikarenakan mendapat dukungan dari panglima sagoe sama dengan mendapat dukungan dari masyarakat Aceh Selatan. Seperti yang diketahui bahwa panglima sagoe mendapat keistimewaan sendiri di hati masyarakat Aceh Selatan. Sehingga mendapat dukungan dari panglima sgoe menjadi pertimbangan penting untuk meraih kemenangan, seperti yang dilakukan calon kandidat pada pilkada tahun 2018. Hal ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat Aceh Selatan dalam wawancaranya:

Benar saat ada yang ingin maju dalam pilkada atau perpolitikan di Aceh Selatan pasti akan mendatangi panglima sagoe untuk meminta saran dan pendapat serta dukungan dari panglima sagoe. Seperti yang diketahui bahwa panglima sagoe mendapat keistimewaan sendiri di hati masyarakat Aceh Selatan. Sehingga mendapat dukungan dari panglima sgoe menjadi pertimbangan penting untuk meraih kemenangan, seperti yang dilakukan calon kandidat pada pilkada tahun 2018.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Masyarakat Aceh Selatan pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

Bedasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa mendapat dukungan dari panglima sagoe sangat penting. Dengan dukungan dari panglima sagoe akan mampu memberi dampak positif pada tingkat kemenangan pada pilkada. Hal ini dikarenakan mendapat dukungan dari panglima sagoe sama dengan mendapat dukungan dari masyarakat Aceh Selatan, dikarenakan masyarakat Aceh Selatan sangat percaya pada panglima sagoe. Oleh karena itu pilihan panglima sagoe akan menjadi pilihan masyarakat Aceh Selatan.

Selain itu masyarakat Aceh Selatan juga menjelaskan bahwa dalam menentukan pilihan terhadap calon kandidat pada pilkada tahun 2018 silam tidak ada paksaan dari pihak panglima sagoe untuk memilih yang didukung oleh panglima sagoe. Masyarakat memilih secara suka rela dan memang mengikuti nasehat dan usulan dari panglima sagoe, namun tidak ada paksaan harus memilih calon kandidat tersebut. Masyarakat di berikan kebebasan dalam memilih selayaknya prinsip pemilu bebas dan adil. Hanya saja masyarakat sudah sangat percaya pada panglima sagoe sehingga akan memilih yang didukung oleh panglima sagoe. Hal ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat Aceh Selatan dalam wawancaranya:

Masyarakat Aceh Selatan saya rasa tidak ada paksaan untuk memilih calon kandidat yang mereka sukai, masyarakat tetap memili kebebasan dalam memilih. Namun karena masyarakat sudah sangat percaya kepada panglima sagoe jadi mereka akan memilih yang didukung oleh panglima sagoe. Ini juga bagian dari

rasa hormat kami dan rasa menghargai kami kepada panglima sagoe.⁴⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Aceh Selatan secara suka rela memilih calon kandidat yang disarankan ataupun oleh panglima sagoe. Ini menandakan masyarakat Aceh Selatan sangat mendengar suara dan saran dari panglima sagoe, sehingga panglima sagoe berhasil memberi pengaruh pada penetapan pilihan sebagian besar masyarakat Aceh Selatan.

Kemudian salah satu Tokoh Masyarakat Aceh Selatan juga memaparkan bahwa tidak ada paksaan kepada masyarakat dalam memilih pada pilkada 2018 silam. Masyarakat bebas memilih siapa saja yang ingin mereka pilih. Akan tetapi masyarakat memang secara suka rela memilih seperti yang disarankan oleh panglima sagoe. Jadi pihak panglima sagoe hanya memberikan saran kepada masyarakat kandidat mana yang cocok untuk memimpin daerah mereka dan membawa kesejahteraan untuk masyarakat Aceh Selatan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Tokoh Masyarakat Aceh Selatan dalam wawancaranya:

Sama sekali tidak ada paksaan kepada masyarakat dalam memilih pada pilkada 2018 silam. Masyarakat bebas memilih siapa saja yang ingin mereka pilih. Akan tetapi masyarakat memang secara suka rela memilih seperti yang disarankan oleh panglima sagoe. Jadi pihak panglima sagoe hanya memberikan saran kepada masyarakat kandidat mana yang cocok untuk memimpin daerah

⁴⁷ Wawancara dengan Masyarakat Aceh Selatan pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

mereka dan membawa kesejahteraan untuk masyarakat Aceh Selatan. Urusan pilihan ada ditangan masyarakatnya sendiri.⁴⁸

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat Aceh Selatan masih bebas dalam menentukan pilihan sendiri. Pihak panglima sagoe hanya memberi saran saja, pilihan tetap ada pada masyarakatnya sendiri. Namun kebanyakan masyarakat memilih seperti yang disarankan oleh panglima sagoe menunjukkan pengaruh panglima sagoe tersebut sangat besar terhadap tingkat partisipasi dalam memilih pada pilkada 2018 silam.

Selanjutnya Panglima Sagoe menjelaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak menakut-nakuti ataupun memaksa masyarakat untuk memilih calon kandidat yang mereka dukung. Pihak panglima sagoe hanya menyarankan dan mengkampanyekan calon kandidat yang menurut mereka bisa menjadi pemimpin yang baik untuk masyarakat Aceh Selatan. Sama sekali tidak ada unsur paksaan kepada masyarakat. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh panglima sagoe dalam wawancaranya:

Kami dari pihak panglima sagoe sama sekali tidak pernah menakuti-nakuti ataupun memaksa masyarakat untuk memilih. Masyarakat silahkan memilih sesuka hati mereka, tugas kami hanya mengkampanyekan calon pemimpin yang menurut kami baik untuk dijadikan pemimpin masyarakat Aceh Selatan.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Aceh Selatan pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

⁴⁹ Wawancara dengan Panglima Sagoe Aceh Selatan pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak panglima sagoe hanya mengajak dan mengkampanyekan calon kandidat kepada masyarakat. Namun dalam menentukan pilihan sama sekali tidak ada paksaan kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan yang dikampanyekan oleh panglima sagoe. Ini menandakan bahwa pihak panglima sagoe masih tetap menjaga prinsip pemilu yaitu setiap orang bebas dalam menentukan pilihannya.

Pihak panglima sagoe juga menjelaskan bahwa kandidat yang mereka dukung bukanlah kandidat sembarangan. Calon kandidat tersebut sudah dilihat kelayakan memimpin dengan visi misi dan tujuan yang jelas. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan di masa depan. Oleh karena itu panglima sagoe sangat hati-hati dalam mendukung kandidat yang akan maju dalam setiap kontestasi politik seperti pilkada 2018 silam. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh panglima sagoe dalam wawancaranya:

Kami sangat teliti dalam mendukung kandidat yang akan maju dalam dunia perpolitikan. Kami tidak sembarangan mendukung kandidat, kami sangat mempertimbangkan visi misi dan tujuan kandidat saat memimpin. Ini kami lakukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan di masa depan. Jadi kami tidak sembarangan menyarankan kepada masyarakat untuk memilih kandidat yang kami dukung.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Panglima Sagoe Aceh Selatan pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan calon kandidat yang didukung oleh panglima sagoe bukanlah sembarangan kandidat. Kan tetapi calon kendidat tersebut sudah dipertimbangkan kelayakan untuk memimpin dan menjamin kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan di masa depan. Hal tersebut diukur dari visi misi dan tujuan dari sang kadidat saat memimpin. Oleh karena itu pnglima sagoe dengan percaya diri dalam menyarankan dan mengkampanyekan calon kandidat kepada masyarakat Aceh Selatan untuk dipilih.

Dari beberapa paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa panglima sagoe sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan calon kandidat oleh masyarakat dalam pilkada tahun 2018 silam. Selain itu panglima sagoe juga berpengaruh terhadap ikut serta masyarakat dalam dunia politik seperti maju dalam pilkada. Dukungan yang diberikan oleh panglima sagoe mampu memberi dampak langsung terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap kontestasi politik yang diadakan di Aceh Selatan, seperti pada kegiatan pilkada Aceh Selatan tahun 2018 silam

4.3. Peran Panglima Sagoe Pada Pilkada Aceh Selatan Di Tahun 2018

Untuk melihat peran panglima sagoe pada pilkada Aceh Selatan tahun 2018 silam dapat diukur dari tingkat kepercayaan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada tersebut. Seperti yang terlihat bahwa pada pilkada 2018 silam masyarakat cukup antusias terlibat dalam kontestasi politik tersebut. Hal ini tidak lain karena adanya peran panglima

sagoe yang mengarahkan calon kandidat untuk maju pada pilkada dan kepercayaan masyarakat yang sangat besar pada panglima sagoe. Sehingga masyarakat ikut memilih apa yang di sarankan dan didukung oleh panglima sagoe. Ini menandakan panglima sagoe memainkan peran penting terhadap berjalannya pilkada di Aceh Selatan. Dan mampu memberikan dampak positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat Aceh Selatan dalam pilkada 2018 lalu.

Seperti yang sudah disebutkan bahwa sosok panglima sagoe sangat dihormati oleh masyarakat Aceh Selatan. Oleh karena itu banyak masyarakat Aceh Selatan sebelum mencalonkan diri pada pilkada, akan terlebih dahulu mendekati diri dengan para panglima sagoe. Hal ini dilakukan karena panglima sagoe sangat berperan penting dalam meningkatkan suara masyarakat dalam kontestasi pilkada. Seperti yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Aceh Selatan bahwa suara panglima sagoe sangat di dengar dan dihormati oleh masyarakat. Apabila panglima sagoe menyarankan satu kandidat untuk dipilih maka masyarakat akan memilih kandidat tersebut. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat juga akan meningkat saat ada ajakan dari pihak panglima sagoe. Hal ini menandakan panglima sagoe sangat besar perannya di masyarakat Aceh Selatan. Hal ini disampaikan oleh salah Satu Tokoh Masyarakat Aceh Selatan dalam wawancaranya:

Panglima sagoe di sini sangat dihargai, suaranya sangat didengar. Jadi kalau ditanya peran panglima sagoe tentu sangat besar. Apabila panglima sagoe menyarankan satu kandidat untuk dipilih

*maka masyarakat akan memilih kandidat tersebut. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat juga akan meningkat saat ada ajakan dari pihak panglima sagoe. Hal ini menandakan panglima sagoe sangat besar perannya di masyarakat Aceh Selatan.*⁵¹

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa peran panglima sagoe dalam meningkatkan minat partisipasi masyarakat dalam dunia perpolitikan khususnya dalam kegiatan pilkada Aceh Selatan tahun 2018 silam sangatlah besar. Baik berperan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk maju sebagai kepala daerah maupun keterlibatan masyarakat dalam memilih kepala daerah. Hal ini ditandai dengan antusiasnya masyarakat Aceh Selatan yang ikut dalam pilkada tahun 2018 silam, dimana masyarakat merasa senang mendapat ajakan dan arahan dari pihak panglima sagoe.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu masyarakat Aceh Selatan bahwa mereka merasa senang karena mendapat arahan dan saran dari panglima sagoe. Karena menurut masyarakat tersebut arahan dan usulan yang diberikan oleh panglima sagoe pasti merupakan yang terbaik. Secara panglima sagoe aktif di bidang pemerintahan dan politik. Jadi masyarakat percaya terhadap pilihan dari panglima sagoe adalah pilihan terbaik. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Saya sebagai masyarakat merasa senang, saya rasa bukan saya saja masyarakat yang lain mungkin merasakan hal yang sama karena mendapat arahan dan saran dari panglima sagoe. Menurut

⁵¹ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Aceh Selatan pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

saya arahan dan usulan yang diberikan oleh panglima sagoe pasti merupakan yang terbaik. Secara panglima sagoe sangat aktif di bidang pemerintahan dan politik. Jadi saya percaya pada pilihan panglima sagoe adalah pilihan terbaik.⁵²

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap saran yang diberikan oleh panglima sagoe sangat besar. Ini menandakan peran panglima sagoe dalam masyarakat sangat jelas dimana panglima sagoe mampu meyakini masyarakat bahwa pilihan yang diusulkan oleh panglima sagoe adalah pilihan terbaik. Hal ini sudah di praktekkan langsung dalam pilkada Aceh Selatan tahun 2018 silam.

Panglima Sagoe juga sangat berperan dalam menyadarkan pentingnya ikut berpartisipasi dalam pilkada. Di karenakan masyarakat akan menentukan nasib mereka untuk 5 tahun kedepan. Jadi dengan hadirnya panglima sagoe di tengah-tengah masyarakat dapat mengedukasi masyarakat untuk menetapkan pilihan terbaik dalam aktivitas pilkada yang dilaksanakan di Aceh Selatan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh panglima sagoe dalam wawancarnya:

Kami dari pihak panglima sagoe tidak pernah bosan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam setiap kontestasi politik yang dilaksanakan di Aceh Selatan seperti pilkada tahun 2018 silam. Kami dengan berbagai macam cara mengupayakan tingkat partisipasi masyarakat lebih baik dari pada pilkada periode lalu.⁵³

⁵² Wawancara dengan Masyarakat Aceh Selatan pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

⁵³ Wawancara dengan Panglima Sagoe Aceh Selatan pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa kehadiran panglima sagoe sangat berperan dalam mengedukasi kepada masyarakat bahwa ikut berpartisipasi dalam pilkada itu sangat penting. Karena masyarakat akan menggantungkan nasibnya kepada pemimpin yang terpilih lima tahun kedepan. Terlihat panglima sagoe mengupayakan segala cara untuk mengajak masyarakat terlibat secara aktif dalam pilkada tahun 2018 silam. Oleh karena itu masyarakat harus terlibat aktif agar memilih pemimpin yang benar-benar mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya menurut Tokoh Masyarakat Aceh Selatan bahwa berpartisipasi dalam pilkada ini sangat penting untuk kemajuan daerah dan mengubah nasib masyarakat kedepan. Oleh karena itu masyarakat harus terlibat aktif dalam pilkada tersebut. Salah satu alasan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pilkada tidak lain karena ada ajakan dan edukasi pentingnya berpartisipasi pada pilkada yang dilakukan oleh pihak panglima sagoe. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan minat partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun 2018 silam. Hal ini terbukti mampu meningkatkan minat masyarakat Aceh Selatan dalam pilkada tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Aceh Selatan dalam wawancaranya:

Seperti yang kita tahu bersama bahwa pilkada ini sangat penting untuk masa depan dan kemajuan daerah serta masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakatnya tidak peduli lalu siapa yang akan peduli dengan kemajuan daerah ini. Oleh karena itu masyarakat harus terlibat aktif dalam pilkada. Dalam meningkatkan minat

masyarakat pihak panglima sagoe telah melakukan edukasi, kampanye dan ajakan kepada masyarakat agar mau ikut dalam pilkada jangan golput. Ini terbukti bisa meningkatkan partisipasi masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pilkada itu sangat penting dalam merubah nasib dan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu perlu keaktifan masyarakat untuk terlibat dalam pilkada tersebut. Di sini pihak panglima sagoe memainkan perannya sebagai orang yang dipercayai oleh masyarakat untuk mengedukasi, mengkampanyekan dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pilkada dan tidak memilih golput. hal ini terbukti mampu meningkatkan minat masyarakat untuk memilih dan minat masyarakat untuk menyalonkan diri.

Berdasarkan beberapa paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa peran panglima sagoe dalam pilkada Aceh selatan tahun 2018 sangat besar, dimana masyarakat akan ikut terlibat dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun mencalonkan diri semua tergantung arahan dan usulan dari pihak panglima sgoe. Ini menandakan panglima sagoe mampu memainkan peran penting di Aceh Selatan. Panglima sagoe memainkan perannya dengan cara mengajak, mengkampanyekan dan mengedukasi ke masyarakat pentingnya berpartisipasi dalam pilkada.

⁵⁴ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Aceh Selatan pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang Pengaruh Panglima Sagoe Terhadap Pola Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Aceh Selatan 2018, maka bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas dapat penulis simpulkan bahwa Panglima sagoe sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan calon kandidat oleh masyarakat dalam pilkada tahun 2018 silam. Selain itu panglima sagoe juga berpengaruh terhadap ikut serta masyarakat dalam dunia politik seperti maju dalam pilkada. Dukungan yang diberikan oleh panglima sagoe mampu memberi dampak langsung terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap kontestasi politik yang diadakan di Aceh Selatan, seperti pada kegiatan pilkada Aceh Selatan tahun 2018 silam.

Sedangkan untuk peran panglima sagoe dalam pilkada Aceh selatan tahun 2018 sangat besar, dimana masyarakat akan ikut terlibat dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun mencalonkan diri semua tergantung arahan dan usulan dari pihak panglima sgoe. Ini menandakan panglima sagoe mampu memainkan peran penting di Aceh Selatan. Panglima sagoe memainkan perannya dengan cara mengajak,

mengkampanyekan dan mengedukasi ke masyarakat pentingnya berpartisipasi dalam pilkada.

5.2. Saran

- a) Masyarakat Aceh Selatan harus lebih aktif untuk ikut terlibat dalam pilkada bukan hanya karena ada ajakan saja dari panglima sagoe, akan tetapi diharapkan ada inisiatif dan kesadaran dari masyarakat sendiri untuk memahami bahwa terlibat dalam setiap kontestasi politik itu penting
- b) Pihak panglima sagoe harus lebih aktif lagi dalam membimbing masyarakat agar benar-benar paham makna dari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pilkada
- c) Panglima sagoe harus mampu mengupayakan cara-cara dan pendekatan lain selain kampanye dan edukasi agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap pilkada yang dilaksanakan di Aceh Selatan.
- d) Panglima sagoe beserta jajarannya sebagai sosok yang dihormati oleh masyarakat Aceh Selatan harus mampu menyadarkan masyarakat bahwa ikut terlibat dalam pilkada adalah kepentingan bersama

DAFTAR PUSTAKA

- Hardi, Daerah Istimewa Aceh; Latar Belakang Politik dan Masa Depan
(Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), cet ke-1
- Ahmad Farhan Hamid, Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006),
- Arther Muhalling, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro, FISIP UNSRAT Manado.s
- Samsul Bahri, 2019, Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau putaran ke dua di kota pekan baru tahun 2018
- Sondakh Gideon, 2018, Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 (Study Di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa).
- Ni Ketut Arniti, 2020, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar, Universitas Pendidikan Nasional.
- Lidya Zakarias, 2018, Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara tahun 2015 (Study Di Kelurahan Kolongan Behar Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe)
- Syahrin B. Kamahi. Transformasi identitas etnis sebagai modal politik dalam kontestasi politik. Jurnal Program Studi Ilmu Politik Vol. IX No. 1 April 2020.
- Michael Grenfell, Pierre Bourdieu Agent Provocateur, London: Continuum, 2004
- Jane Ritchie dan Jane Lewis, Qualitative Research Practice, London: SAGE Publications, 2003
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, Bandung, Alfabeta, 2007
- Albi anggito, Metodologi penelitian kualitatif, Jawa barat, Cv jejak, 2018
- Hamid Patilima Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Aceh Selatan di Aceh pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan
- Wawancara dengan Masyarakat Aceh Selatan di Aceh pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

Wawancara dengan Panglima Sagoe Aceh Selatan di Aceh pada tanggal 10 Desember 2021 di Aceh Selatan

